

DAFTAR PUSTAKA

- Afifulloh Afifulloh, Tunggul Anshari SN, and Shinta Hadiyantina. "Politik Hukum Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)* 2, no. 2 (October 2023): 97–97. <https://doi.org/10.32503/klausula.v2i2.4077>.
- Amalia Abbas, Nur. "Sengketa Empat Pulau Di Aceh: Solusi Hukum Dan Peran Pengadilan." Government Website. *Mahkamahagung.Go.Id*, June 16, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sengketa-4-pulau-di-aceh-solusi-hukum-dan-peran-pengadilan-0kD>.
- Ananda, Mesakh Dachi. "Arti Otonomi Daerah, Tujuan, Dan Prinsip." 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/507625/arti-otonomi-daerah-tujuan-dan-prinsip>.
- Aprilia Hariani. "Empat Tujuan Desentralisasi Fiskal Indonesia." *Www.pajak.com. Pajak.Com*, 2023. <https://www.pajak.com/pajak/empat-tujuan-besar-desentralisasi-fiskal-indonesia/>.
- Arrum, D. A. (2019). *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Atmadja, INPB, and I Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desentralisasi%20fiskal>.
- Badrudin, R. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Bartolini, D., S. Stossberg dan H. Blöchliger. "Desentralisasi dan Disparitas Regional." Makalah Kerja Departemen Ekonomi OECD, No. 1330, Penerbitan OECD, Paris, 2016: Abstrak.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 187–208.
- Cahrlie Rudyat, SH. *Kamus Hukum*. 2025th ed. n.d.
- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim and Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia. *Menuju Puncak Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat Dan Laut*. n.d.
- Desi Syahrani, D. Sitanggung, Vito Rogantina Nababan, and A. Nasution. "Desentralisasi Fiskal Dan Politik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di

Indonesia.” *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1606>.

Fitryantica, Agnes. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316.

Hans Kelsen. “*Pure*” *Theory*. Fifth. The law Book Exchange, 2008. University of California Press Berkeley and Los Angeles 1967.

Hans Nawiasky. *Bayerisches Verfassungsrecht*. Z. Schweitzer Verlag (Arthur Sellier), 1923. Muchen, Berlin and Lipzig.

Ibrahim, Eviandi. “Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah.” *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 5 (2021): 90–97.

Indonesia, BBC. “Empat Warga Pati Ditangkap Polda Jateng Terkait Demo Menuntut Mundur Bupati Sudewo.” News Website. *Www.Bbc.Com*, Oktober 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1181zznd51o>.

Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian. “kbli.” Government Website. *oss.go.id*, Oktober , 09:49 WIB 2025. <https://oss.go.id/id/kbli>.

Ismah Naqiyah and Ghunarsa Sujatnika. “Politik Hukum Perizinan Berusaha Di Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Dan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023.” *SYARIATI*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4627>.

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021, 85 85 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175423/pp-no-85-tahun-2021>.

Jusuf, Muhamad Bacharuddin, and Adara Khalfani Mazin. “Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

Karianga, Hendra. *Carut- Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*. 1st ed. 1 1. Kencana, n.d.

Kemendikbud. “kkbi.” Government. *kbbi.kemdikbud.go.id*, April 18, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melancarkan>.

Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023, 35 35 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>.

Kitsiou, Dimitra, and Michael Karydis. *Marine Spatial Planning*. Nova Science Publishers, 2017.

KPPN Muko-Muko. “Undang Undang HKPD, Refleksi Dan Penyelaras Fiskal Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.” *Djpb.Kemenkeu.Go.Id*, n.d. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mukomuko/id/data-publikasi/artikel/3042->

undang-undang-hkpd,-refleksi-dan-penyelaras-fiskal-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-2.html.

Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004.

LPS, Aliansi. Decentralization Net. Senin Desember 2021. <https://decentralization.net/2021/12/fiscal-decentralization-in-india/> (diakses Mei 22, 2025).

Mayasari, Ditanur Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

Mualif. “Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia: Menelusuri Jejak Menuju Pemerintahan Yang Berkualitas.” *UIAN Lampung*, 2023, 5–5.

Muhid, Hendrik Khoirul. “Fakta Pagar Laut Sepanjang 30,16 Km Di Perairan Tangerang.” *Pers Website. Www.Tempo.Co*, January 15, 2025. <https://www.tempo.co/politik/15-fakta-pagar-laut-sepanjang-30-16-kilometer-di-perairan-tangerang--1194256>.

Nasir, Muhammad Safar. “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 30–45.

Nasution, Anwar. “The Government Decentralization Program in Indonesia.” In *Central and Local Government Relations in Asia*, 276–305. Edward Elgar Publishing, 2017.

Nora Galuh Candra Asmarani. “Apa Itu Desentralisasi Fiskal ?” *News.d.dtc.Co.Id*, n.d. <https://news.d.dtc.co.id/literasi/kamus/29655/apa-itu-desentralisasi-fiskal>.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023.

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pub. L. No. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701* (2021).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701* (2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 1 (2024).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Nomor 7112, *Lembaran Negara 2025 Nomor 94 25 7* (2025).

- Priyanta, Maret. *Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan*. 5, no. 1 (April 2021): 20–39. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>.
- Qulub, K. (2018) *Otonomi Daerah Seluas-Luasnya Dalam Menjaga Keseimbangan Negara Kesatuan Dan Local Democracy*. (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya).
- Qiston, Ajid. “Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Humani* 1, no. 1 (2024).
- Rifa’i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, and Geofani Milthree Saragih. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rina Widowati. *Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia*. Mei 2023. <https://gurupkn.com/sejarah-otonomi-daerah-di-indonesia>.
- Saifulah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kesatu. PT Refika Aditama, 2018.
- Saraswati, Retno. “Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Yustisia* 2, no. 3 (2013): 97–103.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan. *Himpunan Peraturan Dan Kebijakan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. 2024th ed. Triwulan IV 2024. Kementerian Keuangan, 2025.
- Setiawan, Agus, and Basri Musri. *Perpajakan Umum*. 1 1. PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari, Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, and Nur Auliya Rahmatika. *Hukum Perizinan*. Sinar Grafika, 2024.
- Smith, Adam. *The Wealth of Nations*. nos. 412–413. Modern Library, 2000.
- Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan, Pub. L. No. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/189816/permen-kkp-no-10-tahun-2021>.
- Subhan, Ahmad Heri Widodo, and A. Sujianto. “Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Daerah.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1518>.
- Suriadi, Hari, Lince Magriasti, and Aldri Frinaldi. “Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 193–210.

Suryani, Anih Sri. "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan." *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 12, no. 20 (2020): 13–18.

Susanto, Sri Nurhari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–41.

Sutrisno A.Pi. M.Si. *Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional Guna Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. E-Book. 76 78. Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia, n.d.
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011613/swf/6130/mobile/index.html#p=1>.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757, 1 1 (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.

Wasistiono, Sadu, and Petrus Polyando. *Politik Desentralisasi Di Indonesia Edisi Revisi Yang Diperluas*. IPDN PRESS, 2017.

YOA, SFR. "Menteri ATR Nusron Cabut SHGB Pagar Laut Tangerang." Pers Website. *Www.Cnnindonesia.Com*, January 22, 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250122112145-92-1190100/menteri-atr-nusron-cabut-shgb-pagar-laut-tangerang>.

